

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : Inspektorat
TAHUN ANGGARAN : 2026

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / (Indikator/Tujuan)	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Baseline)	Indikator Kinerja
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengawasan Internal SUB KEGIATAN : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	1. Jumlah PD di Provinsi Kalimantan Timur 39 (1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 20 Dinas & Badan dan 7 Biro) 2. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah sebanyak 149 orang terdiri dari Laki-laki 84 orang (56%) dan Perempuan 65 Orang (44%). Dengan rincian PNS sebanyak 121 Orang dan P3K sebanyak 28 Orang - Pejabat Struktural dan Penyetaraan sebanyak 8 orang (L : 7 dan P : 1) Fungsional Pengawasan sebanyak 63 orang (*Auditor 81 orang = L : 42 orang dan P : 39 orang ; *P2UPD 24 Orang = L : 14 Orang dan P : 10 Orang) - Fungsional Umum sebanyak 10 orang (L : 6 Orang dan P : 4 orang) - P3K sebanyak 28 orang (L ; 17 orang dan P : 11 orang)	Akses : Masih rendahnya jumlah perangkat daerah yang mengganggu Anggaran Responsif Gender di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan karena keterbatasan kemampuan SDM pada perangkat daerah tersebut tentang Gender Partisipasi : 1. Belum adanya pelatihan dan pendampingan penyusunan PPRG secara intensif dan optimal 2. Masih rendahnya komitmen dari perangkat daerah untuk melakukan pengintegrasian gender dalam perencanaannya Kontrol : 1. Belum adanya tools/juklak/juknis yang dapat digunakan sebagai pedoman/panduan untuk melakukan pengawasan/evaluasi berbasis prinsip 3 E berkaitan dengan PPRG 2. Belum optimalnya peran Pokja PUG Provinsi Kalimantan Timur Manfaat : Pengawasan/Evaluasi belum mampu mendorong perangkat daerah menyusun perencanaan PPRG berdasarkan prinsip 3E	1. Kurangnya pemahaman Fungsional Pengawasan tentang bagaimana melakukan pengawasan/evaluasi terhadap integrasi gender dalam perencanaan perangkat daerah 2. Regulasi sebagai dasar penyusunan PPRG pada Perangkat Daerah sudah ada, namun belum dilaksanakan secara optimal 3. Pengawasan/evaluasi PPRG sudah dilakukan, namun belum pengawasan/evaluasi yang dilakukan belum mengacu pada pengawasan/evaluasi PPRG berdasarkan prinsip 3 E	1. Belum optimalnya pendampingan dalam penyusunan PPRG pada setiap Perangkat Daerah 2. Belum optimalnya fungsi Pokja PUG pada lembaga driver PUG maupun pada perangkat daerah teknis	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah a. Menurunkan jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak mengintegrasikan gender dalam perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Tools/ Juknis/ Juklak Pengawasan/ Evaluasi PPRG berdasarkan prinsip 3 E 2. Sosialisasi pengawasan /evaluasi PPRG berdasarkan prinsip 3E pada Perangkat Daerah 3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah sebagai Driver PUG (Bappeda dan DKP3A Prov. Kaltim) untuk memberikan pendampingan penyusunan PPRG pada perangkat daerah 4. Mengusulkan / Menegaskan penyusunan PPRG pada perangkat daerah dengan menggunakan surat Gubernur Kalimantan Timur pada pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Masukkan : Rp. 315,859,734 Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 15 Laporan Hasil : 1. Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP sebesar 100% 2. Persentase Identifikasi Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah sebesar 100% 3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP sebesar 85%	1. Jumlah PD di Provinsi Kalimantan Timur 39 (1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 20 Dinas & Badan dan 7 Biro) 2. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah sebanyak 149 orang terdiri dari Laki-laki 84 orang (56%) dan Perempuan 65 Orang (44%). Dengan rincian PNS sebanyak 121 Orang dan P3K sebanyak 28 Orang - Pejabat Struktural dan Penyetaraan sebanyak 8 orang (L : 7 dan P : 1) Fungsional Pengawasan sebanyak 63 orang (*Auditor 81 orang = L : 42 orang dan P : 39 orang ; *P2UPD 24 Orang = L : 14 Orang dan P : 10 Orang) - Fungsional Umum sebanyak 10 orang (L : 6 Orang dan P : 4 orang) - P3K sebanyak 28 orang (L ; 17 orang dan P : 11 orang)	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 84 Laporan Outcome : 1. Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP sebesar 100% 2. Persentase Identifikasi Manajemen Resiko Pada Perangkat Daerah sebesar 100% 3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP sebesar 80% Indikator Kinerja : Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Samarinda, 10 Juli 2025
 Inspektur



Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197408181997031006